

OMBUDSMAN RI RAKOR PENGAWASAN MBG DI BABEL, DORONG PENGAWASAN LINTAS INSTANSI

Jum'at, 04 September 2026 - kepbabel

BABELPOS.ID, PANGKALPINANG - Kunjungan kerja Fikri Yasin, S.Ikom, M.Ikom selaku Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ombudsman Republik Indonesia diisi dengan Rapat Koordinasi Pengawasan Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) se-Kepulauan Bangka Belitung pada Kamis, 03 September 2026, di Gedung Nata Praja BKPSDMD Prov. Kep. Bangka Belitung.

Kegiatan tersebut dihadiri 42 (empat puluh dua) peserta perwakilan SPPG dari beberapa daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta tamu undangan dari beberapa instansi yang menjadi pemateri yakni Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Regional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bangka Belitung.

Rapat Koordinasi Pengawasan Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) se-Kepulauan Bangka Belitung ini diselenggarakan untuk membahas sejumlah aspek penting dalam pelaksanaan MBG, antara lain pemenuhan standar gizi dan keamanan pangan, kualitas bahan pangan, proses pengolahan dan distribusi makanan, pengelolaan lingkungan dan limbah, serta aspek tata kelola dan pelayanan kepada penerima manfaat.

"Dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Ombudsman menyoroti secara serius tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kepulauan Bangka Belitung.

Sebelumnya, masih ditemukan sejumlah kasus keracunan dan ditemukannya benda asing pada makanan dalam pelaksanaan di lapangan yang menunjukkan perlunya penguatan tata kelola, pengawasan, serta koordinasi antar instansi," ujar Fikri Yasin.

Kegiatan ini selain dirancang sebagai titik pertemuan strategis antara Ombudsman dan instansi yang bertugas melakukan pengawasan program MBG juga menjadi ruang diskusi untuk bertukar gagasan dan penyelarasan langkah lintas instansi demi meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya layanan pada program MBG di Bangka Belitung agar tidak berulangnya insiden kritis seperti keracunan makanan MBG serta menjamin keselamatan penerima manfaat program MBG.

Fikri Yasin juga menegaskan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan program MBG tidak cukup berfokus pada ditemukannya permasalahan di lapangan, tetapi harus diikuti dengan tindak lanjut dan rekomendasi hasil penhawasan yang jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan.

"Kami berharap semua instansi yang terlibat dalam proses pengawasan dapat menjalankan tanggungjawab dan perannya sebagai instansi pengawas secara profesional.

Ketika ditemukan adanya persoalan insiden kritis atau potensi maladministrasi, jangan memberikan rekomendasi yang sumir atau tidak jelas. Rekomendasi hasil pengawasan harus disusun berdasarkan fakta dan data di lapangan, mengidentifikasi persoalan secara tepat, serta memberikan arah perbaikan yang konkret," tegasnya.

Menurutnya, pengawasan yang efektif dan berintegritas harus mampu memastikan setiap temuan baik insiden kritis

ataupun yang lain harus mendapatkan penyelesaian yang tepat dan mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik.

"Kita harus bersikap profesional, objektif, dan berani menyampaikan apa yang menjadi temuan di lapangan.

Tujuan akhirnya bukan sekadar menemukan kesalahan, tetapi memastikan pelayanan program MBG berjalan dengan baik dan memberikan layanan yang optimal bagi penerima manfaat," pungkas Fikri.

Program MBG memiliki hubungan erat dengan berbagai sektor, mulai dari penyediaan bahan pangan, pemenuhan standar gizi, keamanan pangan, kesehatan, hingga pengelolaan limbah.

Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, SPPG, instansi teknis penyelenggara maupun pengawas, serta pemangku kepentingan lainnya.

Melalui Rapat Koordinasi Pengawasan Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) se-Kepulauan Bangka Belitung ini, Pimpinan Ombudsman RI mendorong agar pelaksanaan MBG di seluruh wilayah Kepulauan Bangka Belitung tidak hanya berorientasi pada pemenuhan target distribusi makanan, tetapi juga memastikan mutu, keamanan, kebermanfaatan, dan kualitas pelayanan bagi masyarakat penerima manfaat.

Pimpinan Ombudsman RI juga menekankan pentingnya penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan.

Berbagai temuan, kendala, maupun potensi maladministrasi yang muncul dalam pelaksanaan MBG diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bersama sehingga program dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi pengawasan dan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan keterlibatan berbagai instansi pemangku kepentingan dan perwakilan SPPG dari beberapa daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pimpinan Ombudsman RI melalui Ombudsman Babel berkomitmen untuk terus mendorong penyelenggaraan program MBG yang memenuhi standar pelayanan publik serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.